

ABSTRAK

Amir Ahmad Fasya. 190102030171. *Konsep Bernegara Menurut Abdurrahman Wahid (Gusdur) di Indonesia*. Skripsi, Pembimbing : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata kunci: Abdurrahman Wahid (Gusdur), Konsep Bernegara

Konsep Bernegara Menurut Abdurrahman Wahid Di Indonesia yakni Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, mengusung konsep bernegara yang menekankan pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Bagi Gus Dur, Pancasila sebagai ideologi negara harus menjadi landasan yang inklusif, menghargai keragaman dan menghindari dominasi ideologi tertentu yang dapat memecah belah bangsa. Ia memandang Pancasila sebagai kesepakatan politik yang memungkinkan kehidupan nasional yang sehat dalam bingkai negara kesatuan, dan menolak penggunaan agama sebagai ideologi tunggal negara karena hal itu dapat memicu disintegrasi.

Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui konsep bernegara menurut Abdurrahman Wahid (Gusdur) di Indonesia dan gagasan-gagasan beliau dalam menata Indonesia dan hubungan baik antara agama dengan negara.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bersifat kepustakaan dan data-datanya didasarkan atau diambil

dari bahan – bahan tertulis, baik yang berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik/tema pembahasan skripsi ini.

Konsep Bernegara Menurut Abdurrahman Wahid Di Indonesia yakni Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, mengusung konsep bernegara yang menekankan pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Bagi Gus Dur, Pancasila sebagai ideologi negara harus menjadi landasan yang inklusif, menghargai keragaman dan menghindari dominasi ideologi tertentu yang dapat memecah belah bangsa. Ia memandang Pancasila sebagai kesepakatan politik yang memungkinkan kehidupan nasional yang sehat dalam bingkai negara kesatuan, dan menolak penggunaan agama sebagai ideologi tunggal negara karena hal itu dapat memicu disintegrasi. Gus Dur juga menekankan pentingnya demokrasi yang menghormati hak-hak individu, partisipasi aktif warga, dan transparansi dalam pemerintahan, serta memastikan perlindungan terhadap minoritas.